



Warga melintas di spanduk larangan penggunaan tanah sempadan di kawasan Kampung Karanganyar RT 84/RW 19, Kelurahan Brontokusuman, Kementren Mergangsan, Kota Jogja, Jumat (5/11).

► SEMPADAN KALI CODE

Spanduk Larangan Mulai Dipasang

MERANGSAN-Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) bersama petugas gabungan memasang spanduk imbauan larangan penggunaan tanah sempadan di area Kampung Karanganyar RT 84/ RW 19, Kelurahan Brontokusuman, Kementren Mergangsan, Kota Jogja.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Pemasangan dilakukan karena kawasan itu masih menyisakan sejumlah bangunan semi permanen yang belum diterbitkan warga.

Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) DIY mengaku kecewa dengan pemasangan spanduk tersebut.

Musababnya, warga menyebut telah ada kesepakatan antara warga dan

► Warga menyebut telah ada kesepakatan antara warga dan BBWSSO akan ada mediasi lanjutan.

► Sebelumnya BBWSSO meminta warga menerbitkan secara mandiri bangunan semi permanen yang melanggar aturan sempadan sungai.

pihak BBWSSO akan ada mediasi lanjutan soal kisruh penggunaan lahan di wilayah sempadan sungai itu. Sebelumnya BBWSSO meminta warga menerbitkan secara mandiri bangunan semi permanen yang melanggar aturan sempadan sungai.

"Dipasang kemarin sekitar pukul 11.00 WIB. Kami sempat bertanya yang bertanggung jawab atas pemasangan siapa, tetapi petugas hanya bilang atas arahan pimpinan. Jelas kami kecewa karena koordinasi terakhir rencananya ada mediasi pada 25 November untuk

membahas kelanjutan penataan kawasan ini," kata Ketua PMKCM DIY, Kris Triwanto Jumat (5/11).

Adapun spanduk dipasang di tiga titik di sebelah barat sungai. PMKCM menyatakan masih kukuh dengan sikap semula yakni keberatan dengan program penertiban.

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk mendatangi BBWSSO dan pihak kementren untuk menyampaikan keberatan soal pemasangan spanduk dan imbauan larangan itu. "Kami akan meminta kejelasan mengapa sampai terjadi pemasangan sepihak ini. Jelas ini masih *status quo* dan akan mediasi 25 November," ujar Kris.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWSSO, Bambang Sumadyo menjelaskan penertiban masih belum dilakukan oleh petugas mengacu pada kesepakatan terakhir yang direkomendasikan oleh DPRD DIY, tentang penundaan penertiban di kawasan itu. Sampai saat ini BBWSSO mengaku masih

menunggu dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

"Karena yang meminta pelaksanaan penertiban ditunda kemarin dari dewan, maka kami menunggu kabar dari dewan sambil koordinasi," ujarnya.

Berdasarkan Kesepakatan

Mantri Anom Mergangsan, Pargiyat mengatakan pemasangan spanduk dilakukan berdasarkan tiga poin kesepakatan yang dihasilkan saat koordinasi kali terakhir. Salah satunya adalah soal batas waktu penertiban di kawasan itu.

Namun, karena adanya permintaan penundaan oleh DPRD DIY, saat ini warga yang belum menerbitkan bangunan diminta untuk segera melakukannya.

"Sebenarnya kan aturannya sudah lama, jadi pemasangan spanduk itu hanya sebagai pengingat saja bahwa di kawasan sempadan tidak boleh ada aktivitas yang tidak berizin," ucap Pargiyat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kementren Mergangsan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Brontokusuman			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005